BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi saat ini berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Salah satu bentuk integrasi teknologi dalam dunia pendidikan adalah munculnya metode pembelajaran berbasis daring. Pembelajaran daring kini menjadi pilihan utama karena kemudahan aksesnya, memungkinkan proses belajar dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Secara umum, pembelajaran daring merujuk pada sistem pembelajaran yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Menurut Dereck Stockley tahun 2006, *Learning Management System* (LMS) merupakan metode penyampaian materi pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan melalui perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel dengan berbagai metode yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi.[1]

Sejalan dengan definisi tersebut, *Learning Management System* (LMS) juga dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

[1] Dewi S. Prawiradilaga. *Mozaik Teknologi Pendidikan E-Learning*. (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 33

guna mencapai tujuan edukasi, peningkatan kinerja, serta penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Penerapan *Learning Management System* (LMS) memberikan berbagai manfaat bagi institusi pendidikan dan pelatihan, memungkinkan proses pembelajaran tetap berlangsung meskipun terdapat kendala jarak dan waktu. Selain itu, LMS mampu memenuhi kebutuhan peserta didik akan sumber belajar digital yang mudah diakses kapan pun dan di mana pun melalui perangkat berbasis teknologi serta jaringan internet. Dengan pemanfaatan yang optimal, LMS berpotensi meningkatkan hasil pembelajaran secara lebih efektif.

Tidak hanya di bidang pendidikan, *Learning Management System* (LMS) juga telah diadopsi oleh berbagai perusahaan dan lembaga sebagai inovasi dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Salah satu institusi yang telah menerapkan LMS dalam sistem pelatihannya adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendesa PDT RI) merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.[2]

[2] Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan 2

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperkuat pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyakarat desa. Upaya pemberdayaan ini meliputi pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.[3] Selain itu, pemberdayaan juga berperan sebagai instruksi kerja bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM).

Instruksi kerja yang dilaksanakan oleh BSPDM dalam pemberdayaan masyarakat desa ini menjadi acuan utama untuk mengelola Tenaga Pendamping Profesional (TPP), yang bertugas untuk mendampingi masyarakat desa dalam berbagai proses pemberdayaan. Dengan adanya instruksi kerja ini, setiap pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat memiliki arah yang jelas dan terorganisasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.[4]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM) memiliki tugas

[3] Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 (4)
[4] Keputusan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 143 Tahun 2022.

utama untuk mengembangkan sumber daya manusia sekaligus memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya di desa dan kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka melibatkan Tenaga Pendamping Profesional (TPP), yaitu sumber daya manusia yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus di bidang pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. TPP dibentuk menjadi enam kedudukan, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pegiat Desa (PD), Pendamping Teknis, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Kabupaten/Kota), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Provinsi), dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Pusat).

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dikelola oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3MD) yang merupakan bagian dari BPSDM, memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengelola TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan dengan baik. P3MD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pembangunan yang bersifat partisipatif. Melalui P3MD, TPP mendapatkan pelatihan dan persiapan untuk mendukung pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Salah satu dari kedudukan TPP adalah Pendamping Lokal Desa (PLD). PLD merupakan tenaga terampil pemula yang bertugas mendampingi masyarakat desa secara langsung. Mereka berkedudukan di desa dan memiliki wilayah kerja yang mencakup desa tersebut. Untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugas, PLD diutamakan berasal dari penduduk setempat yang berdomisili di wilayah kecamatan tempat mereka bertugas.

Pendamping Lokal Desa (PLD) memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang PLD menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang kebijakan program pembangunan desa, keterbatasan keterampilan teknis dalam mendampingi masyarakat, hingga kesulitan membangun hubungan yang efektif dengan perangkat desa dan masyarakat setempat. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi optimalisasi peran PLD dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan khusus yang dirancang untuk mempersiapkan PLD sebelum mereka mulai menjalankan tugas di lapangan. Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa bertujuan memberikan orientasi dan pembekalan agar para pendamping siap secara mental, memiliki pengetahuan yang memadai, serta menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pelatihan Pra Tugas dirancang untuk meningkatkan pemahaman PLD terhadap latar belakang, tujuan kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur, dan ketentuan dalam program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami mekanisme pendampingan secara efektif, baik dari sisi teknis maupun sosial.[5]

Tak hanya itu, pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen, sikap kepedulian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat desa yang mereka dampingi, sehingga mereka mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan optimal guna mendukung keberhasilan upaya pemberdayaan desa. Dengan adanya pelatihan ini, PLD dapat menjalankan peran mereka secara optimal, menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa, sekaligus mendukung keberhasilan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Pusat), Bapak Nur Cholis yang mengungkapkan bahwa ketika pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa menggunakan metode tatap muka memiliki keterbatasan waktu untuk menyampaikan materi, mengakibatkan proses pembelajaran kurang maksimal. Keterbatasan tempat dan sarana pendukung, sehingga untuk melaksanakan sesuai

[5] Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas PLD Tahun 2023

alur yang tertuang di *lesson plan* tidak terlaksana secara ideal. Serta minimnya media pembelajaran yang terkesan kurang variatif, hanya menampilkan tayangan video dan bahan presentasi.[6]

Pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dengan metode tatap muka memiliki sejumlah kendala, seperti minimnya variasi media pembelajaran, keterbatasan sarana dan waktu, serta perbedaan kapasitas peserta yang signifikan. Lingkungan yang kurang mendukung, dan metode pembelajaran kurang interaktif yang membuat peserta kesulitan memahami materi secara optimal. Akibatnya, kinerja peserta tidak menunjukkan peningkatan signifikan, sebagaimana terlihat dari hasil *pre-test* dan *post-test*.

Laporan pelaksanaan pelatihan adalah evaluasi yang bersifat administratif. Bentuk evaluasi yang disusun oleh setiap provinsi hanya fokus pada pencatatan pelaksanaan kegiatan, seperti kehadiran peserta, jumlah jam pelajaran, materi yang disampaikan, hingga dokumentasi berupa foto dan video. Selain itu, evaluasi juga mencakup hasil *pre-test* dan *post-test* peserta, namun hanya untuk melihat peningkatan skor, bukan menggali lebih dalam bagaimana peserta benar-benar menerima dan merasakan manfaat dari pelatihan tersebut.

Pada akhir pelatihan, peserta diminta mengisi survei kepuasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan

[6] Hasil wawancara dengan TAPM Pusat pada tanggal 8 November 2024

pelatihan ke depan. Namun, evaluasi ini lebih berfungsi sebagai formalitas dalam administrasi pelaksanaan pelatihan dibandingkan sebagai alat untuk memahami secara mendalam bagaimana peserta benar-benar menerima dan memanfaatkan pelatihan ini dalam pekerjaan mereka.

Hal tersebut menunjukkan perlunya inovasi, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Learning Management System* LMS), untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Sebagai upaya inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pembelajaran, Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa tahun 2024 dilakukan secara mandiri melalui "*Learning Management System* Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (LMS Kemendesa)". Untuk mengakses LMS Kemendesa peserta dapat membuat akun untuk mendaftar, setelah itu, dapat mengikuti petunjuk dan arahan untuk mengakses fitur-fitur yang ada di dalam LMS Kemendesa.

Terdapat berbagai macam informasi utama seperti Pengantar Bahan Bacaan, Kata Pengantar Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayan Masyarakat Desa, Pengantar Pelatihan Daring Pelatihan Lokal Desa, serta Visi dan Misi. Terdapat juga delapan materi pokok, yaitu Desa dan Visi UU Desa, Tata Kelola Desa, Pembangunan Desa, Pengembangan Ekonomi Desa, Penguatan Keberdayaan Desa, Manajemen Pendampingan, Membangun Tim Kerja di Desa, dan Program Komunitas Untuk Iklim (Proklim). Masing-

masing materi terdapat media pembelajaran seperti Modul, Videografis, dan Infografis.

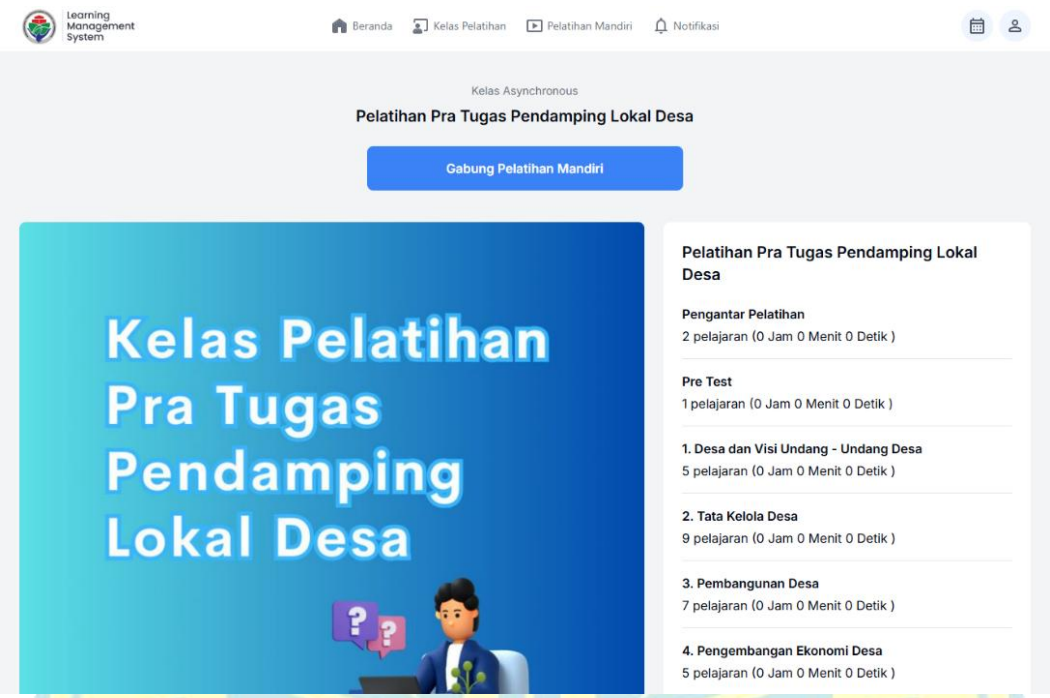

Gambar 1.1 Visualisasi Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa
Sumber: LMS Kemendes PDT

Learning Management System (LMS) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dibuat sebagai teknologi informasi dan komunikasi dan sarana pendukung pelatihan daring bagi peserta pelatihan, salah satunya Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa yang merupakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan saat ini. LMS Kemendesa memungkinkan PLD untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel dan mandiri, tanpa terbatas oleh waktu atau lokasi. Dengan berbagai fitur seperti, forum diskusi, *pre-test*, pengumpulan tugas, *post-test*, dan survei kepuasan. Untuk media

pembelajaran yang disajikan adalah modul, videografis, dan infografis. LMS Kemendesa tidak hanya mempermudah proses pembelajaran tetapi juga membuatnya lebih interaktif dan menarik.

Selain itu, LMS Kemendesa membantu mengatasi kendala yang sering muncul pada metode tatap muka, seperti keterbatasan waktu, sarana, dan lingkungan yang tidak mendukung. LMS Kemendesa juga mendukung peserta dengan berbagai tingkat kemampuan untuk belajar sesuai kecepatan masing-masing, sehingga meningkatkan efektivitas pelatihan secara keseluruhan. Kehadiran LMS Kemendesa sebagai bagian dari Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa mencerminkan penerimaan teknologi informasi yang semakin kuat dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Berikut adalah grafik hasil *pre-test* dan *post-test* pada tahun 2021 sampai 2023 dan tahun 2024 setelah melaksanakan dengan metode pelatihan daring.

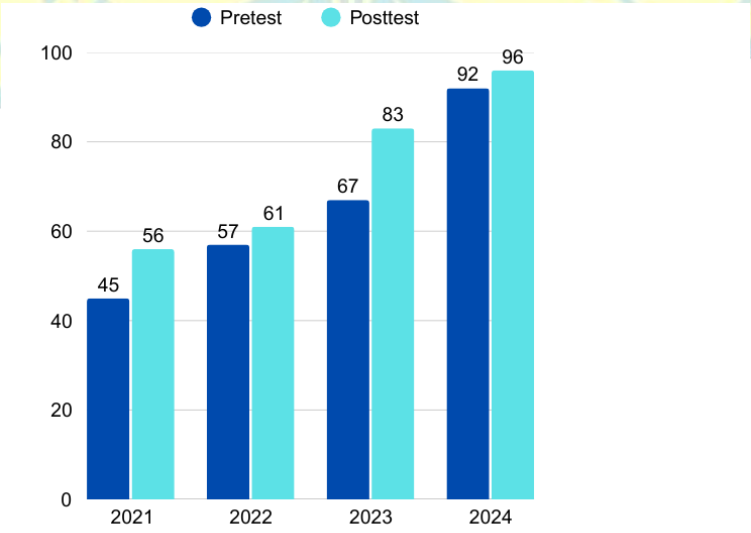

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa

Gambar 1.2 Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Tahun 2021-2024

Pada Gambar 1.2 diatas memperlihatkan perkembangan hasil nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test* peserta tahun 2021 sampai 2023 dengan metode tatap muka, dan tahun 2024 menggunakan LMS Kemendesa untuk Pelatihan Daring. Grafik tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri yang menggambarkan hasil *pre-test* dengan warna biru tua, dan bagian kanan yang menggambarkan hasil *post-test* dengan warna biru muda. Data ini merepresentasikan hasil pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh P3MD dari tahun ke tahun, dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pada tahun 2021 hingga 2023, pelatihan dilaksanakan menggunakan metode tatap muka. Dalam periode tersebut, nilai rata-rata *pre-test* mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021, nilai *pre-test* tercatat sebesar 45. Nilai ini meningkat menjadi 57 pada tahun 2022 dan menjadi 67 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara umum peserta mulai memiliki pemahaman awal yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, pelatihan mulai menggunakan LMS Kemendesa sebagai media utama dalam pelaksanaan pelatihan. Implementasi LMS ini membawa dampak yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata *pretest* tahun 2024 yang mencapai angka 92.

Hal serupa juga terlihat dari hasil *post-test* peserta. Pada tahun 2021, nilai rata-rata *post-test* adalah 56, kemudian meningkat menjadi 61 pada tahun 2022, dan meningkat ke angka 83 pada tahun 2023. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2024, dengan nilai rata-rata

post-test mencapai angka 96. Peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa penggunaan LMS Kemendesa sebagai sistem pelatihan berbasis digital sangat mendukung efektivitas pembelajaran peserta. Fitur-fitur LMS Kemendesa seperti akses fleksibel terhadap materi dan forum diskusi diduga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal.

Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan perbedaan yang cukup signifikan antara hasil pelatihan sebelum dan sesudah beralih menggunakan LMS Kemendesa. Dengan kata lain, penggunaan LMS Kemendesa pada tahun 2024 terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Melihat keterbatasan dalam pendekatan evaluasi yang selama ini dilakukan, diperlukan metode yang lebih mampu menangkap pengalaman dan penerimaan peserta secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, pendekatan evaluasi akan berbeda. Fokusnya bukan hanya pada angka-angka atau data administratif, tetapi bagaimana peserta benar-benar menerima pelatihan daring ini. Untuk itu, evaluasi akan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang akan membantu melihat bagaimana peserta merasakan kemudahan penggunaan, manfaat, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerimaan mereka terhadap sistem pelatihan daring ini.

Metode dalam evaluasi yang dilakukan tidak hanya sekadar melihat apakah pelatihan berjalan sesuai rencana, tetapi juga sistem yang

digunakan dalam pelatihan daring ini benar-benar efektif dan diterima oleh peserta. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan pelatihan berbasis digital di lingkungan Kemendesa PDT, khususnya dalam optimalisasi penggunaan LMS Kemendesa untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelatihan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan definisi Teknologi Pendidikan menurut *Association for Educational Communications and Technology* (AECT) tahun 2023 yaitu,

> *"Educational technology is the ethical study and application of theory, research, and practices to advance knowledge, improve learning and performance, and empower learners through strategic design, management, implementation, and evaluation of learning experiences and environments using appropriate processes and resources.".*[7]

LMS Kemendesa menyediakan pelatihan daring terintegrasi yang memungkinkan penyampaian materi pembelajaran, pemantauan kemajuan peserta, dan pengelolaan. LMS Kemendesa mendukung prinsip-prinsip teknologi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, efisien, dan menarik bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelenggara Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa yaitu P3MD perlu mengkaji apakah Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa melalui LMS Kemendesa yang digunakan

---

[7] Association for Educational Communications and Technology. *Definition of Educational Technology.* 2023. Definition Task Force.

bisa diterima atau tidak. Dalam Teo tahun 2011 disebutkan bahwa penerimaan pengguna teknologi didefinisikan sebagai,

"..as a user's willingness to employ technology for the tasks it is designed to support".[8]

Bahwa penerimaan teknologi dapat didefinisikan sebagai kesediaan pengguna untuk menggunakan teknologi untuk mendukung tugas yang telah dirancang.

Pendamping Lokal Desa (PLD) harus memiliki kemampuan dalam penerimaan penggunaan teknologi. Penerimaan penggunaan teknologi merupakan kesediaan pengguna untuk menggunakan teknologi yang disediakan oleh P3MD dalam menunjang pelatihan seputar Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dan kebijakan yang ada. Apabila teknologi yang dipakai untuk menyalurkan informasi dan pembelajaran tersebut digunakan tanpa disertai dengan kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya secara benar maka akan mengurangi fungsi dan kemanfaatan dari suatu teknologi yang disediakan sebagai transformasi pelatihan. Adapun salah satu metode yang digunakan untuk mengukur penerimaan serta penggunaan teknologi adalah *Technology Acceptance Model* (TAM).

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model Penerimaan Teknologi merupakan salah satu teori penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya

[8]Teo, Timothy. 2011. *Technology Acceptance in Education*: Research and Issues. Netherlands: Sense Publishers.

digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Model TAM dikembangkan untuk menjelaskan perilku pengguna sistem informasi atau teknologi.[9] Terdapat beberapa teori yang dihasilkan dari *technology acceptance model* yaitu yang pertama teori difusi inovasi, yang mana teori difusi ini mendominasi berbagai bentuk penerimaan informasi teknologi dan teori yang kedua yaitu teori psikologis, yang mana tersebut merupakan teori mengenai perilaku para pemakai teknologi yang dilandasi oleh rasa kepercayaan atau keyakinan, keinginan, sikap dan hubungan antar perilaku pengguna.

Technology Acceptance Model (TAM) dalam penerimaan pengguna teknologi dapat mengidentifikasi persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan (*perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), sikap dari kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan (*attitude toward using*), intensitas perilaku pengguna (*behavioral intention to use*), dan penggunaan sistem secara aktual (*actual system use*) terhadap penggunaan teknologi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian dilakukan dengan harapan dapat mengetahui dan memudahkan penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

---

[9] Tri Nurhadiani. *Penerimaan GIAT SD (Galeri Informasi, Aktivitas, dan Transformasi Sekolah Dasar) Oleh Kepala Sekolah dan Guru*. (Skripsi: 2023). h. 12

judul **"Penerimaan Pelatihan Daring 'Pra Tugas Pendamping Lokal Desa' dengan *Technology Acceptance Model* (TAM)."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang teridentifikasi, maka untuk pengidentifikasian beberapa masalah yang ditemui, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dengan metode konvensional ini sudah dimanfaatkan oleh PLD dalam mendukung kegiatan bertugas?
2. Apakah dengan menggunakan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan PLD?
3. Dengan informasi yang disajikan pada Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa, apakah PLD mengimplementasikan pembelajaran yang didapat?
4. Bagaimana kegunaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa?
5. Bagaimana manfaat Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dalam memberikan informasi seputar pemberdayaan masyarakat?
6. Bagaimana penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, untuk pembatasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada masalah penelitian yaitu bagaimana penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa. Adapun objek pada penelitian ini yaitu Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dan subjek penelitian ini yaitu peserta di wilayah Jawa Barat berdasarkan teori dari Davis mengenai penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* (TAM)).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini adalah bagaimana penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa di wilayah Jawa Barat berdasarkan teori dari Davis mengenai penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* TAM))?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa berdasarkan teori dari Davis mengenai penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* (TAM)).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

   1. Memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengkaji penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa.
   2. Memperkaya kajian mengenai evaluasi formatif dalam kawasan penilaian atau evaluasi dalam Teknologi Pendidikan.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

   1. Bagi Peneliti

      Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, serta mengembangkan pemahaman terkait penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

   2. Bagi Universitas

      Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya kajian ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya mengenai penerimaan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa.

3. Bagi Prodi Teknologi Pendidikan

   Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti mengenai penerimaan pelatihan daring berbasis *Learning Management System* (LMS).

4. Bagi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal

   Hasil penelitian ini dapat membantu Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam mengevaluasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan agar tujuan Pelatihan Daring Pra Tugas Pendamping Lokal Desa dapat tercapai secara optimal. Sehingga informasi dalam pemberdayaan masyarakat yang diberikan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh Pendamping Lokal Desa.

5. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.